

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72  
TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING  
(Studi Kasus Di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LAMRIA SARI SITUMORANG  
198520057**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72  
TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING  
(Studi Kasus Di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**LAMRIA SARI SITUMORANG  
198520057**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/23

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang  
Nama : Lamria Sari Situmorang  
Npm : 198520057  
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP



Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA

Mengetahui



Dekan

Dr. Effiati Hasibuan, M.Si



Ka. Prodi Administrasi Publik

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

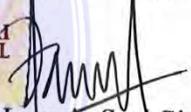
## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa, skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana yang saya peroleh ataupun sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Agustus 2023

  
Lamria Sari Situmorang  
198520057

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

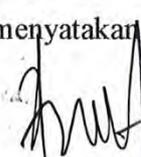
Nama : Lamria Sari Situmorang  
NPM : 198520169  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang, beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: Agustus 2023

Yang menyatakan,



Lamria Sari Situmorang



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya angka stunting di Kelurahan Sicanang karena faktor kemiskinan sehingga terciptanyalah Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang dan untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif sebagai analisi data dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki 6 indikator yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan,Sumber Daya Manusia, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Sosial,Ekonomi,dan Politik. Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa masalah yaitu masih rendahnya sumber daya manusia yang ada di kelurahan Sicanang akibat minimnya pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya untuk cegah stunting.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Stunting.**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the Implementation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 and identify the inhibiting factors of the Acceleration of Stunting Management. Using the theory of Van Meter and Van Horn (1975). The data collection techniques are interviews, and documentation. The result show that implementation of the Accelerated Reduction of Stunting in the Sicanang Village has been carried out properly and in accordance with the President's policy, but there are several problems, namely the absence of SOPs directly in implementing stunting reduction, reduced public awareness and knowledge of the importance of preventing stunting.*

**Keywords: Implementation, Policy, Stunting.**



## RIWAYAT HIDUP

Lamria Sari Situmorang adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 November 2001. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan sejoli Lemar Situmorang dan Erita br Haloho.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Antonius Medan pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SD Antonius VI Medan dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di SD, penulis melanjutkan ke SMP TRISAKTI 1 Medan dan tamat pada tahun 2017. Kemudian setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 14 Medan dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan tamat pada tahun 2023.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana menjadi syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul Skripsi ini yaitu **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Studi Kasus Di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadang Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, Arahan, Nasihat serta

meluangkan waktu, tenaga dan saran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi dengan baik.

6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasihat, kritikan serta waktu dan arahan yang bersifat membangun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Khairullah, S.Ikom, M.Ikom, Selaku Sekretaris yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu dan Informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
9. Kedua Orangtua Saya (L.Situmorang & E.Br.Haloho) Orang yang hebat, yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti – hentinya memberi kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih untuk semua berkat doa dan dukungan mamak dan bapak saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi Mamak dan Bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
10. Ibu Deby Fauziah S.Sos, MAP, Selaku Lurah Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan, beserta seluruh anggota yang ada di Kantor Kelurahan Sicanang yang telah bersedia memberikan saya kesempatan melakukan penelitian dan memperoleh data-data pada Kantor Kelurahan Sicanang.
11. Teman-teman Seperjuangan saya yang baik hati,cantik, dan selalu support

satu sama lain selama penyusunan skripsi yaitu , Putri Astari ,Widiya Ningsih , Ratih Lestari, Chyntia Haloho.

12. Seluruh teman seangkatan saya khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebut satu persatu Namanya. Terimakasih telah berjuang bersama, semoga kelak semua sukses dalam meraih mimpi.

13. Dan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri ,karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan yang penulis terima dan tidak ada pula yang penulis dapat balaskan melainkan hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga segala kebaikan yang Bapak,Ibu ,dn Teman-tema sekalian berikan kepada penulis dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada akhirnya hanya kepada-Nya kita kembali dan berserah diri atas segala kekurangan yang kita miliki sebagai seorang insan biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Medan, Agustus 2023  
Penulis

**Lamria Sari Situmorang**  
**198520057**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	9
2.2 Implementasi Kebijakan .....	10
2.2.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik .....	11
2.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	13
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn .....	14
2.3 Stunting.....	21
2.3.1 Pengertian Stunting .....	21
2.3.2 Dampak Stunting.....	22
2.3.3 Proses Penyebab Stunting .....	23
2.3.4 Upaya Pencegahan Stunting.....	29
2.3.5 Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting .....	30
2.3.6 Intervensi Stunting .....	33
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
2.5 Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian .....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	40
3.2.2 Waktu Penelitian .....	40
3.3 Informan Penelitian .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
4.1.2 Visi Misi Kantor Kelurahan Sicanang .....	49
4.1.3 Struktrur Organisasi .....	50
4.1.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Sicanang .....	51

4.2 Keadaan Penduduk di Kelurahan Sicanang.....	51
4.2.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Sicanang.....	53
4.2.2 Status Penduduk di Kelurahan Sicanang .....	54
4.3 Program Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang .....	55
4.3.1 Program Pemberi Makanan Tambahan (PMT) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.....	56
4.3.2 Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Sicanang D’Best) .....	56
4.4 Pembahasan .....	
4.4.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kelurahan Sicanang .....	56
4.4.2 Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang.....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Balita Terkena Stunting di Kelurahan Sicanang .....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1	Sarana Pendidikan Kelurahan Sicanang.....	51
Tabel 4.2	Sarana Kesehatan Kelurahan Sicanang.....	52
Tabel 4.3	Sarana Rumah Ibadah di Kelurahan Sicanang .....	52
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk di Kelurahan Sicanang.....	53
Tabel 4.5	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Sicanang.....	54
Tabel 4.6	Jumlah Masyarakat pada Jenjang Pendidikan Penduduk di Kelurahan Sicanang .....	55



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan.....	50
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data .....	46
Gambar 4.1 Dapur Sicanang D'Best .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi Wawancara.....	89
2. Lampiran Pedoman Wawancara.....	95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan masalah gizi penting yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Stunting juga dapat terjadi pada saat janin masih dalam kandungan akibat ketidakmampuan ibu untuk mengonsumsi protein yang cukup dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Salah satu masalah gizi yang paling umum yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah kekurangan energi protein (KEP). Tingginya kasus gizi buruk pada anak di bawah usia lima tahun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masalah gizi yang cukup serius. Bayi pendek (penghambat) adalah masalah kelaparan terus-menerus yang mempengaruhi kekecewaan perkembangan pada tubuh dan otak karena kurangnya asupan makanan yang sehat untuk anak-anak cukup lama. Akibatnya, anak berkembang pada tingkat pemikiran yang lebih lambat dan menjadi lebih pendek dari anak-anak pada umumnya seusianya. Pertumbuhan jangka panjang balita akan terhambat jika tidak mendapatkan cukup protein dan energi. (Atikah Rahayu, 2018).

Stunting adalah keadaan paling umum dari bentuk kekuatan gizi, yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir, terkait dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil, dan pertumbuhan janin. Menurut Sudiman dalam Ngaisyah, stunting pada anak balita merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau dan pada 2 tahun awal kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Salah satu faktor sosial ekonomi yang

mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi orangtua dan ketahanan pangan keluarga

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam hal kepadatan penduduk, Indonesia berada di urutan keempat, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Terdapat 7,8 juta anak stunting di seluruh dunia, data ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF dan memosisikan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara dengan jumlah anak stunting tertinggi. (Unicef,2007).

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Dengan angka stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen maka untuk mencapai target tersebut diperlukan penurunan 2,7 persen di setiap tahunnya. Untuk mencapai target tersebut pemerintah melakukan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitive. Intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum dan dimasa kehamilan, yang umumnya dilakukan di sektor kesehatan. Sedangkan intervensi sensitive dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan merupakan kerja sama lintas sektor. (setkab,2022).

Pada tahun 2018, Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) menemukan bahwa 27,0% anak usia di bawah lima tahun mengalami stunting di kota Medan. Prevalensi Kota Medan pada tahun 2019 sebesar 11,3%, prevalensi Kota Medan pada tahun 2020 sebesar 27,1%, prevalensi Kota Medan tahun 2021 sebesar 19,9%, prevalensi Kota Medan pada tahun 2022 sebesar 19,44%. (Kementerian Kesehatan RI,2018).

Kelurahan Sicanang sebagai daerah yang ada di Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan yang diprioritaskan pencegahan dan percepatan stunting di Kota Medan. Kecamatan Medan Belawan merupakan Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Medan, terdapat pada Kelurahan Sicanang ada 65 kasus anak penderita stunting. Berikut akan disajikan table anak stunting di Kelurahan Sicanang :

**Tabel 1.1 Data Balita Terkena Stunting di Kelurahan Sicanang**

No	Nama Balita	Usia	Status		
			PB/TB	BB	Gizi Baik, Kurang, Buruk
1.	Hanif Abid Lubis	39 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
2.	M Kalifah	23 Bulan	Pendek	Normal	Gizi Baik
3.	Mutia Izwani	27 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
4.	Fauzan	34 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
5.	Candra Dawi	17 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Kurang
6.	Chairul Zayn Rangkuti	23 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
7.	Cahaya Kesha	23 Bulan	Pendek	Normal	Gizi Baik
8.	Pesta Natalia	29 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
9.	Azka Ramadhan	48 Bulan	Sangat pendek	Sangat kurang	Gizi Baik
10.	Fiki Wahyudi	31 Bulan	Sangat pendek	Sangat kurang	Gizi Baik
11.	Rangga Putra Wijaya	32 Bulan	Sangat pendek	Kurang	Gizi Baik
12.	Bram Fais	32 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
13.	Sheyla Anatasya	39 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Kurang
14.	Lima Pandawa S	19 Bulan	Pendek	Sangat Kurang	Gizi Sangat Kurang
15.	M Arahman	36 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi sangat kurang
16.	Gibran Simanjuntak	18 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi baik
17.	Daniel William M	33 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
18.	Siti Syahara	58 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
19.	Airin Enjelina Purba	48 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
20.	Rehan Virga Manurung	44 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
21.	Rahma Nauli	51 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Baik
22.	Luthfi Sakhi Zaydan	41 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Kurang
23.	Dwi Hartika Ningrum	42 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
24.	M Andira	50 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Kurang
25.	Clairin Nathania Hondro	44 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
26.	Alexander Sipahutar	49 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
27.	Nabil Syaquilla	49 Bulan	Sangat	Kurang	Gizi Baik

			Pendek		
28.	Liska	45 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
29.	Attariq Silitonga	56 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
30.	Desi Alfiyah	42 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
31.	Ade Arisha Syafitri	53 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
32.	Robby Darmawan	20 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Baik
33.	Kirana Sirait	28 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
34.	Karin Trilifia Marpaung	23 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Kurang
35.	Agung Wijaya	26 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Kurang
36.	Helsa Audris S	26 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Kurang
37.	Azkia Nurziah	48 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Kurang
38.	Gracya	48 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Baik
39.	Ronaldo	51 Bulan	Pendek	Sangat Kurang	Gizi Buruk
40.	Hizam	40 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
41.	Aisah Dinita	52 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
42.	Tuan Anugrah	35 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Buruk
43.	Rizkyzia	15 Bulan	Pendek	Sangat Kurang	Gizi Baik
44.	M Azriwaqi	11 Bulan	Pendek	Normal	Gizi Baik
45.	Raysha	10 Bulan	Pendek	Normal	Gizi Baik
46.	Akhtar	19 Bulan	Pendek	Normal	Gizi Baik
47.	Zeline Aletha	5 Bulan	Pendek	Normal	Gizi Baik
48.	Rahyan Andra	27 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
49.	Haholongan	39 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
50.	Ibnu	56 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
51.	Ristianoa	12 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
52.	Kaisan Maulana	22 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
53.	Alvitro	9 Bulan	Pendek	Sangat Kurang	Gizi Kurang
54.	Vioneta	23 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
55.	Regina	14 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
56.	Aleza	30 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
57.	Mutia Syakira	51 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
58.	Haikal Pratama	20 Bulan	Sangat Pendek	Kurang	Gizi Baik
59.	Arfandi	37 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
60.	Nurgibran	14 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik
61.	Kamalludin Ilyas	32 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Sangat Kurang
62.	Dwi Ananda	22 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Kurang
63.	Affah	32 Bulan	Sangat Pendek	Sangat Kurang	Gizi Baik
64.	Qamira Azam	8 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Kurang
65.	Nadiradania Putri	7 Bulan	Pendek	Kurang	Gizi Baik

Sumber : Data Kelurahan Sicanang (2022)

Pada table 1.1 dapat dilihat bahwa Kelurahan Sicanang di Kecamatan Medan Belawan memiliki tingkat stunting yang tinggi menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral belum dilakukan dengan baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sangat penting untuk keberhasilannya. Namun, melihat situasi saat ini, banyak orang yang tidak mengetahui definisi, penyebab, efek, dan solusi potensial stunting.

Ibu Deby Fauziah selaku Lurah Sicanang menyatakan, bahwa 65 anak di Kelurahan Sicanang mengalami stunting. Data diambil pada Selasa, 31 Mei 2022, dan subjek memiliki tinggi badan yang tidak normal, tubuh yang sangat kurus, mudah sakit, dan gizi buruk, yang juga memprihatinkan. Berat badan yang tidak berubah sama sekali dan ketidaktahuan ibu dan anak akan pentingnya stunting akibat kurangnya sosialisasi dengan lurah dan kader setiap lingkungan. Menurut Lurah Sicanang Deby Fauziah, penyebab utama tingginya angka stunting pada balita adalah faktor ekonomi yang menyebabkan kekurangan gizi kronis sejak kehamilan hingga dua tahun terakhir, atau 1.000 hari pertama kehidupan, serta orang tua. Kurangnya pemahaman tentang pola pengasuhan anak, terutama dalam hal memberikan asupan gizi. (JPNN, 2022).

Upaya untuk percepatan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang, Pemerintah Kota Medan akan terus menerapkan sesuai pada Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Komvergensi Pencegahan Stunting di Kota Medan dengan pertimbangan, bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dengan cara melakukan perbaikan gizi optimal yang dilakukan secara terus – menerus,

dan Kota Medan telah ditetapkan sebagai salah satu perluasan lokasi focus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020 oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Medan telah menetapkan 10 (sepuluh) lokasi focus pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kota Medan tahun 2020. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kota Medan.

Sama halnya dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Presiden ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Peraturan Presiden ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembangaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dikarenakan angka stunting yang dinilai semakin tinggi pada masyarakat.

Dengan adanya bentuk peraturan ini diharapkan pemerintah khususnya Kelurahan Sicanang dapat memberi perhatian lebih terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini. Masyarakat khususnya di Kelurahan Sicanang juga dihimbau untuk aktif dalam mengikuti setiap program mengenai stunting baik dari puskesmas maupun kelurahan. Maka dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah diharapkan angka stunting pada anak dapat turun karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membuat Tujuan Penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan.
2. Untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

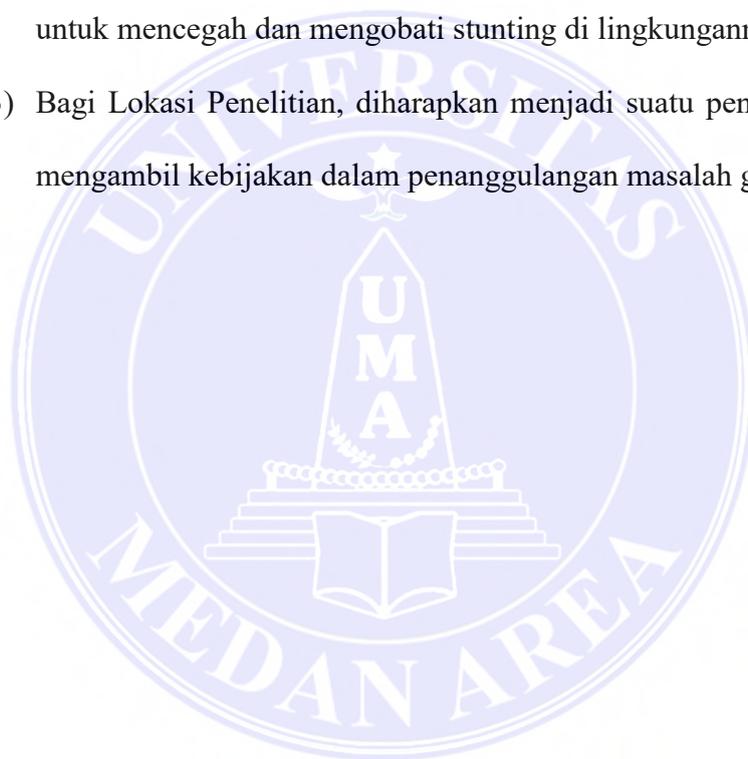
1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan menambah literatur pada Implementasi Peraturan

dalam Percepatan Penurunan Stunting dan menjadi referensi tambahan atas penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan S1 pada Jurusan Administrasi Publik, Universitas Medan Area.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis.
- 2) Diharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk mencegah dan mengobati stunting di lingkungannya.
- 3) Bagi Lokasi Penelitian, diharapkan menjadi suatu pengetahuan untuk mengambil kebijakan dalam penanggulangan masalah gizi stunting.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil dalam sekelompok politik dengan cara untuk mencapai sebuah tujuan yang mana berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pada kekuasaan. Secara teori, kebijakan ini dapat diberlakukan oleh mereka yang membuatnya. Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan adanya tujuan, nilai, dan praktik serta sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan.

James E. Anderson, yang dikutip dalam Budi Winarno, memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan publik: –Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil dalam sekelompok politik dengan cara untuk mencapai sebuah tujuan yang mana berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pada kekuasaan dan kebijakan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan serta nilai dan praktik dalam mengenai hal dan tindakan yang dilakukan dengan serangkaian pelaksanaan yang mengatur pada suatu pokok perundang-undangan dengan adanya keputusan untuk memecah masalah yang ada dalam masyarakat dengan adanya proses pembentukan suatu masalah untuk dipecahkan secara kebijaksanaan dalam evaluasi.

Kebijakan publik adalah proses memilih dan memilah opsi terbaik untuk cara mengatasi masalah sosial tertentu. Itu adalah hasil legislasi. Pembentukan masalah, cara penyelesaiannya, pemilihan kebijakan, pelaksanaannya, dan

evaluasinya adalah semua komponen kebijakan publik.(Hukum,2017).

Menurut Fredich dalam Agustino (2017 : 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan( kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai system. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn(1994) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur yaitu kebijakan public, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan publik dengan implementasi yang berada pada tahap-tahap perundang-undangan dalam pelaksanaannya dengan program-program dan upaya kebijakan tersebut. Menurut Ayuningtyas (2014), Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan di mana setiap individu tersebut menjaga kelompok dengan adanya keputusan-keputusan kebijakan yang ada di dalamnya. Sebuah implementasi dipandang bahwa dapat melaksanakan program dengan tujuan tersebut dengan tugas-tugas yang mana Sudah mereka janjikan untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat khususnya pada

lingkungan dengan hal-hal pokok lainnya yang menjadi sebuah administrasi yang melatarbelakangi dalam kegiatan tersebut. Implementasinya membutuhkan penyelesaian konteks, kepribadian, aliansi, dan kegiatan secara berkelanjutan, terlepas dari pentingnya formalitas organisasi dan administrasi.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan – tujuan atau target – target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi Kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan pejabat – pejabat pemerintah baik secara individu ataupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005: 65). Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah : –Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.”(Edward III dalam Winarno,2007:174).

### **2.2.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam suatu negara modern dalam menyelesaikan suatu masalah , yang dimana kebijakan publik mempunyai ciri – ciri khusus yang melekat dan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazim dipikirkan, di desain, dirumuskan dan diputuskan, oleh orang – orang yang mempunyai otoritas pada suatu negara , yaitu eksklusif, legislator, hakim, administrator. Yang dimana Menurut ahli Kebijakan Gerston,

kebijakan publik itu di buat dan dijalankan oleh orang – orang yang telah diberikana wewenang untuk bertindak dengan persetujuan popular dan sesuai dengan norma – norma dan prosedur.

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan secara terarah pada tujuan tertentu, bukan sekedar sebuah tindakan asal – asalan atau dilakukan secara acak atau tindakan serba kebetulan, yang sudah disiapkan secara matang oleh unit/badan – badan perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan pusat, yang saling berkordinasi antar Lembaga.

- a. Kebijakan pada hakikatnya adalah sebuah tindakan yang saling berkaitan dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh negara melalui keputusan yang sudah dibuat dan diputuskan bersama – sama, yang kemudian di implementasikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dibuat.
- b. Suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dalam bidang – bidang tertentu. Misalnya, mengatur perdagangan, mengendalikan infalasi, menghapus kemiskinan, mencegah atau membrantas korupsi, menurunkan buta aksara yang berada di masyarakat, membuat program bantuan sosial seperti program keluarga berencana, jaminan kesehatan, jaminan sosial, perumahan rakyat, dan lain sebagainya.
- c. Dalam suatu kebijakan publik mungkin bisa berbentuk positif, mungkin pula bisa berbentuk negative, kemungkinan ini meliputi keputusan – keputusan para pejabat pemerintah yang memegang otoritas, untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun yang terjadi di masyarakat, dalam mengatasi masalah yang dimana justru campur tangan

pemerintah diperlukan dimasyarakat.

Hakikatnya suatu kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada satu tujuan, dan akan kita pahami lebih baik lagi, apabila kebijakan itu masuk kedalam beberapa kategori seperti, tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, keluaran kebijakan, hasil akhir kebijakan.

### 2.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses Pembuatan Kebijakan Publik merupakan Proses yang Kompleks karena banyaknya proses dan variabel yang perlu dikaji. Kutipan Budi Winarno tentang tahapan kebijakan publik William Dunn (1999) antara lain sebagai berikut:

- a) Tahap penetapan agenda. Tahap ini di mana para pejabat tersebut menempatkan pada suatu permasalahan dengan adanya akidah-agenda kebijakan yang dimaksudkan agar fokus pada pembahasan dan masalah serta alasan-alasan terjadinya penundaan tersebut.
- b) Tahap pembuatan kebijakan Pertanyaan yang menjadi agenda kemudian didiskusikan oleh pembuat kebijakan. Setelah masalah didefinisikan, ditemukan solusi terbaik. Alternatif atau opsi kebijakan (*policy alternative/policy options*) merupakan solusi dari masalah ini. Dalam proses perumusan kebijakan, setiap opsi bersaing untuk dipertimbangkan sebagai tindakan potensial. Selama tahap ini, setiap aktor akan mencoba memecahkan masalah dengan cara bersaing.
- c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang diajukan oleh pembuat kebijakan, salah satunya akhirnya diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur

lembaga, atau keputusan yudisial.

- d) Tahap implementasi kebijakan Jika suatu program kebijakan tidak dilaksanakan yaitu dilakukan oleh badan-badan administratif dan lembaga-lembaga pemerintah yang lebih rendah hanya akan menjadi catatan elit. Unit-unit administratif yang memobilisasi sumber daya manusia dan keuangan melaksanakan kebijakan yang diadopsi. Beberapa kebijakan didukung oleh pelaksana pada saat ini dalam proses, sementara yang lain mungkin ditentang oleh pelaksana.
- e) Tahap yang dikhususkan untuk evaluasi kebijakan mencakup penilaian atau evaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut memiliki efek yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Akibatnya, ukuran atau standar yang menjadi dasar untuk menentukan apakah atau tidak kebijakan publik yang telah diberlakukan telah mempengaruhi atau mencapai tujuan yang dimaksudkan.

### 2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Model Implementasi Kebijakan Publik Dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, strategi implementasi kebijakan disebut sebagai *–A Model of the Policy Implementation.*” Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau kinerja dari pemahaman kebijakan yang pada hakekatnya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi berdasarkan hubungan antara berbagai variabel.

Variabel-variabel model kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik Agen pelaksana
- 4) Sikap atau Kecenderungan Pelaksana
- 5) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Sosial, dan Politik

Secara rinci, variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Tingkat keberhasilan ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis untuk lingkungan sosial budaya pada tingkat implementasi kebijakan dapat digunakan sebagai ukuran kinerja. Akan sulit untuk mencapai tujuan dan ukuran kebijakan ketika tidak realistis (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) berpendapat bahwa untuk mengukur yang dibuat oleh pelaksanaan strategi, pelaksanaan strategi pada dasarnya adalah penyelidikan tingkat pencapaian prinsip dan target tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan,

dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974).

## 2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1975) bahwa : *–New town 21 suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program* –Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa : *–Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”*

## 3) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian

kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP= *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

a) *Standard Operating Procedures* (SOP).

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

b) Fragmentasi.

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompokkelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *“fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”* Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III,1980).

#### 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Augustine (2006): *–Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari badan pelaksana kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan oleh penduduk lokal yang paham dengan isu yang mereka rasakan. Namun kebijakan publik biasanya datang dari atas ke bawah, sehingga mungkin saja pengambil keputusan tidak menyadari atau bahkan mampu menyentuh isu, keinginan, atau kebutuhan yang ada. perlu ditangani. Perspektif mereka tentang suatu kebijakan dan bagaimana mereka memandang dampaknya terhadap kepentingan pribadi mereka*

mempengaruhi sikap mereka.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.

Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

#### 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yakni tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh disini harus akurat dan berdasarkan sumber yang pasti dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut

diteruskan secara tepat dan benar.

Dalam komunikasi dibutuhkan perintah yang akurat dan jelas. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka akan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, maka nantinya pelaksana kebijakan akan menemukan kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Van Meter dan Van Horn, dalam Widodo 1974). Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

#### 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik adalah hal terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan publik, dan kondisi politik dapat berkontribusi pada kinerja implementasi

kebijakan yang buruk. Oleh karena itu, lingkungan eksternal yang menguntungkan diperlukan untuk upaya implementasi kebijakan.

## 2.3 Stunting

### 2.3.1 Pengertian Stunting

Stunting (kerdil) adalah suatu kondisi di mana balita lebih pendek atau lebih tinggi dari usianya. Panjang dan tinggi badan seseorang dengan kondisi ini harus lebih besar atau sama dengan minus dua standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak WHO. Banyak faktor, termasuk keadaan sosial ekonomi, gizi ibu selama kehamilan, nyeri bayi, dan asupan gizi yang tidak memadai pada bayi, berkontribusi pada stunting balita, masalah gizi yang persisten. Menurut Kemenkes RI (2018), balita stunting akan mengalami kesulitan mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal di masa depan. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motoric maupun mental. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,2017).

Stunting pada anak dapat disebabkan karena tidak mendapatkan perhatian khusus selama 1.000 hari pertama kehidupan, yang menentukan tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Tidak

melalui masa emas, yang berlangsung selama 1.000 hari pertama, juga dapat mengakibatkan stunting. Selama ini, nutrisi yang diperoleh bayi dari ibu dan ASI memiliki efek jangka panjang pada kehidupan orang dewasa. Ini mungkin berlebihan untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak (Kementerian Kesehatan, 2017).

Stunting pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Stunting berkaitan dengan peningkatan resiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit defeneratif di masa mendatang. Hal ini dikarenakan anak stunting juga cenderung lebih rentan terhadap penyakit infeksi, sehingga berisiko mengalami penurunan kualitas belajar di sekolah dan berisiko lebih sering absen. Stunting juga meningkatkan risiko obesitas, karena orang dengan tubuh pendek berat badan idealnya juga rendah. Kenaikan berat badan beberapa kilogram saja bisa menjadikan Indeks Massa Tubuh (IMT) orang tersebut naik melebihi batas normal. Keadaan overweight dan obesitas yang terus berlangsung lama akan meningkatkan risiko kejadian penyakit degeneratif.

### **2.3.2 Dampak Stunting**

Stunting dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak . Dampak stunting terbagi menjadi dua yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari stunting adalah di bidang kesehatan yang dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan mordibitas, di bidang perkembangan berupa penurunan perkembangan kognitif, motoric dan bahasa di

bidang ekonomi adalah peningkatan pengeluaran biaya kesehatan.

Dampak negative yang dapat dikaitkan dengan kejadian stunting diantaranya peningkatan risiko kesakitan dan risiko kematian, gangguan perkembangan kognitif, motoric dan bahasa, kenaikan biaya kesehatan, peningkatan biaya perawatan sakit, orang dewasa yang pendek, obesitas, kesehatan reproduksi yang rendah dan rendahnya produktivitas . Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah lahirnya bayi yang dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dari seorang wanita yang mengalami stunting. Bayi premature dan BBLR rawan terkena infeksi yang dapat menyebabkan kematian. Bayi yang dapat bertahan hidup memiliki risiko kurang gizi dan stunting pada 2 tahun pertama kehidupannya.

### **2.3.3 Proses Penyebab Stunting**

#### **1) Pendidikan Ibu**

Penelitian mengenai hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian stunting yang dilakukan di Kenya memberikan hasil bahwa anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berpendidikan beresiko lebih kecil untuk mengalami malnutrisi yang dimanifestasikan sebagai wasting atau stunting daripada anak-anak yang dilahirkan daripada ibu yang tidak berpendidikan. Hasil yang sama juga diperlihatkan dari hasil penelitian di Mesir, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, resiko anak yang dilahirkan Stunted semakin kecil. Glewwe (1999) menjelaskan mengenai mekanisme hubungan antara pendidikan ibu dengan kesehatan anak. Glewwe berpendapat bahwa mekanisme hubungan pendidikan ibu dengan kesehatan anak terdiri dari tiga yaitu pengetahuan tentang kesehatan, pendidikan formal yang diperoleh ibu dapat memberikan pengetahuan

atau informasi yang berhubungan dengan kesehatan, kemampuan menghitung huruf dan angka diperoleh dari pendidikan formal memberikan kemampuan kepada ibu dalam membaca masalah kesehatan yang dialami oleh anak dan melakukan perawatan, pendidikan formal menjadikan ibu lebih dapat menerima pengobatan modern. Dalam masyarakat dimana proporsi ibu berpendidikan tinggi memungkinkan untuk menyediakan sanitasi yang lebih baik, pelayanan kesehatan dan saling berbagi pengetahuan, informasi kesehatan dibandingkan dengan ibu yang tidak berpendidikan. (Abuya et al, 2012).

## 2) Umur Anak

Penyakit kurang energi dan protein merupakan bentuk malnutrisi terutama terdapat pada anak-anak dibawah umur lima tahun dan kebanyakan di negara-negara berkembang. Umur yang paling rawan adalah balita. Oleh karena itu, pada masa itu anak mudah sakit dan mudah terjadi kurang gizi. Disamping itu, masa balita merupakan dasar pembentukan kepribadian anak sehingga diperlukan perhatian khusus (Soetjningsih, 2004), umur merupakan faktor gizi internal yang menentukan bahwa umur dibawah 6 bulan kebanyakan bayi masih dalam keadaan status gizi yang baik sedangkan golongan umur setelah 6 bulan jumlah balita yang berstatus gizi baik tampak jelas menurun sampai 50%. Setelah itu, ada kecenderungan anak umur 24-59 bulan menderita status gizi kurang disebabkan oleh asupan gizi yang diperlukan untuk anak seusia ini meningkat. Secara kemungkinan lainnya adalah keterpaparan anak dengan faktor lingkungan sehingga akan lebih mudah sakit. Selain itu, pada umur ini balita belum dapat menentukan makanannya sendiri dan sering makan anak balita sudah ditentukan jumlahnya dan tidak ditambah lagi. Laju pertumbuhan pada tahun pertama kehidupan adalah

lebih cepat dibandingkan pada usia lainnya. Antara kelahiran dan usia 1 tahun, panjang badan anak-anak rata-rata meningkat panjang badan dengan 50%, menjadi tiga kali berat lahir mereka. Lingkar kepala meningkat sepertiga. Selama tahun kedua kehidupan laju pertumbuhan melambat terjadi perubahan bentuk yaitu anak ramping dan lebih berotot (Rudolf dan Levene, 2006). Setelah usia 1 tahun, tingkat pertumbuhan anak melambat. Anak-anak umumnya menjadi lebih ramping antara usia 6 bulan dan 6 tahun, ada peningkatan secara bertahap dalam ketebalan lemak pada laki-laki dan perempuan sampai pubertas. Wanita memiliki kandungan lemak tubuh yang lebih besar daripada laki-laki pada tahap perkembangan. Kebutuhan energi anak-anak ditentukan oleh metabolisme individu basal tingkat, pola aktivitas dan tingkat pertumbuhan (Boyle dan Roth, 2010). Anak-anak yang mengalami Stunting lebih awal yaitu sebelum usia enam bulan, akan mengalami Stunting lebih berat menjelang usia dua tahun. Stunting yang parah pada anak-anak akan terjadi deficit jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah, dibandingkan anak-anak dengan tinggi badan normal. Anak-anak dengan Stunting cenderung lebih lama masuk sekolah dan lebih sering absen dari sekolah dibandingkan anak-anak dengan status gizi baik. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap kesuksesan anak dalam kehidupannya dimasa yang akan datang (Ahmad, Edy Harahap, 2014).

### 3) Jenis Kelamin

Jenis kelamin menentukan pula besar kecilnya kebutuhan gizi bagi seseorang. Pria lebih banyak membutuhkan zat tenaga dan protein dibandingkan wanita. Pria lebih sanggup mengerjakan pekerjaan berat yang biasanya tidak biasa

dilakukan oleh wanita. tetapi dalam kebutuhan zat besi, wanita jelas membutuhkan lebih banyak daripada pria. Anak laki-laki lebih sering sakit dibandingkan anak perempuan tetapi belum diketahui secara pasti kenapa demikian. Pada masyarakat tradisional, wanita jelas mempunyai status lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak laki-laki sehingga angka kematian bayi dan malnutrisi masih tinggi pada wanita (Soetjningsih, 2004). Laki-laki lebih cenderung menjadi terhambat pada tahun pertama, sedangkan perempuan lebih mungkin untuk menjadi terhambat pada tahun kedua kehidupan. Karena stunting sangat terkait dengan gangguan perkembangan intelektual selama masa kanak, dan perawakan pendek pada masa dewasa, hasil ini menekankan perlunya pencegahan retardasi pertumbuhan melalui promosi dari perawatan pra kehamilan dan menyusui, serta pengendalian penyakit infeksi (Andair dan Guilkey, 1997).

#### 4) Berat Badan lahir

Berat badan lahir adalah berat badan bayi ketika lahir atau paling lambat sampai bayi berumur 1 hari dilihat dari KMS (Kartu Menuju Sehat) dimana bila berat badan lahir kurang dari 2500 gram berarti berat badan lahir rendah dan bila lebih dari atau sama dengan 2500 gram berarti normal. Berat badan lahir rendah banyak dihubungkan dengan tinggi badan yang kurang atau stunting pada balita (Kusharisupeni, 2002). Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) didefinisikan oleh WHO (2012) yaitu berat lahir kurang dari 2500 gr. Anak yang BBLR kedepannya akan memiliki ukuran antropometri yang kurang di masa dewasa. Bagi perempuan yang lahir dengan berat rendah, memiliki risiko besar untuk menjadi ibu yang Stunting sehingga akan cenderung melahirkan bayi dengan berat lahir rendah seperti dirinya. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang Stunting tersebut akan menjadi

perempuan dewasa yang Stunting juga, dan akan membentuk siklus sama seperti sebelumnya (Soetjiningsih, 2014).

#### 5) ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (Kemenkes RI, 2012). Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain, baik berupa air putih, jus, ataupun susu selain ASI. Pemberian vitamin, mineral, dan obat-obatan diperbolehkan selama pemberian ASI eksklusif (IDAI, 2008). ASI Eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi tanpa tambahan makanan lainnya seperti susu formula, jeruk, madu, teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat apapun seperti pisang, papaya, bubur susu, biscuit, bubur nasi, dan tim sampai usia enam bulan (Roesli, 2007). Pemenuhan kebutuhan bayi 0-6 bulan telah dapat terpenuhi dengan pemberian ASI saja. Menyusui eksklusif juga penting karena pada usia ini, makanan selain ASI belum mampu dicerna oleh enzim-enzim yang ada di dalam usus selain itu pengeluaran sisa pembakaran makanan belum bisa dilakukan dengan baik karena ginjal belum sempurna (Kemenkes R.I, 2012). Banyak manfaat yang didapat dari pemberian ASI eksklusif yaitu sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi sampai 6 bulan, meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena mengandung berbagai zat anti kekebalan sehingga akan jarang menderita sakit, melindungi anak dari serangan alergi, mengandung asam lemak yang diperlukan untuk pertumbuhan otak, meningkatkan daya penglihatan dan kemampuan berbicara, membantu pembentukan rahang yang bagus, mengurangi resiko terkena

penyakit kencing manis, kanker ada anak, dan diduga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung, menunjang perkembangan motorik sehingga bayi ASI eksklusif akan lebih cepat bisa jalan, menunjang perkembangan kepribadian, kecerdasan, emosional, kematangan spiritual, dan hubungan social yang baik (Roesli, 2000).

#### 6) Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Kebutuhan anak balita akan pemenuhan nutrisi bertambah seiring pertambahan umurnya. ASI eksklusif hanya dapat memenuhi kebutuhan nutrisi balita sampai usia 6 bulan, selanjutnya ASI hanya mampu memenuhi kebutuhan energi sekitar 60-70% dan sangat sedikit mengandung mikronutrien sehingga memerlukan tambahan makanan lain yang biasa disebut makanan pendamping ASI (MP-ASI). Pengertian dari MP-ASI menurut WHO adalah makanan/minuman selain ASI yang mengandung zat gizi yang diberikan selama pemberian makanan peralihan yaitu pada saat makanan/minuman lain yang diberikan bersamaan dengan pemberian ASI kepada bayi (Muhilal dkk, 2004). Pemberian MP-ASI merupakan proses transisi dimulainya pemberian makanan khusus selain ASI secara bertahap jenis, jumlah, frekuensi maupun tekstur dan konsistensinya sampai seluruh kebutuhan gizi anak dipenuhi oleh makanan keluarga. Jenis MP-ASI ada dua yaitu MP-ASI yang dibuat secara khusus baik buatan rumah tangga atau pabrik dan makanan biasa dimakan keluarga yang dimodifikasi agar mudah dimakan oleh bayi. MP-ASI yang tepat diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak baik jenis maupun jumlahnya. Resiko terkena penyakit infeksi akibat pemberian MP-ASI terlalu dini disebabkan karena usus yang belum siap menerima makanan serta kebersihan yang kurang (Meilyasari

dan Isnawati, 2014). Pemberian makanan padat atau tambahan terlalu dini dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif serta meningkatkan angka kesakitan pada bayi, selain itu tidak ditemukan bukti yang menyokong bahwa pemberian makanan padat atau tambahan pada usia 4 atau 5 bulan lebih menguntungkan, bahkan sebaliknya hal ini akan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan bayi dan tidak ada dampak positif untuk perkembangan pertumbuhannya (Pudjiadi, 2001). Pemberian makanan pendamping ASI harus diberikan tepat pada waktunya, artinya adalah bahwa semua bayi harus mulai menerima makanan pendamping sebagai tambahan ASI mulai dari usia 6 bulan keatas dan diberikan dalam jumlah cukup, artinya makanan pendamping harus diberikan dalam jumlah, frekuensi, konsistensi yang cukup serta jenis makanan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa pertumbuhan (WHO, 2011).

#### **2.3.4 Upaya Pencegahan Stunting**

Rentang usia 0 sampai 2 tahun yang disebut juga dengan "usia emas" tumbuh kembang anak ditandai dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Selama periode janin sampai anak berusia dua tahun dan tidak terjadi pada kelompok usia lain, 1.000 hari pertama sering disebut sebagai "jendela peluang" atau "masa emas ini". Berdampak pada kesehatan dan gizi orang dewasa. Mengingat tingginya prevalensi stunting di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya untuk mencegah hal tersebut. Berikut upaya pencegahan stunting antara lain :

1. Selama kehamilan, setidaknya 90 tablet penambah darah diberikan kepada ibu hamil.
2. Pemberian Makanan Tambahan Khusus (PMT).
3. Mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan.

4. Menggunakan dokter atau bidan yang terampil untuk melahirkan.
5. Memperkenalkan menyusui di tahap awal (IMD) Menyusui secara eksklusif untuk bayi di bawah usia 6 bulan Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia enam bulan sampai dua tahun (MP-ASI) Pemanfaatan zat gizi dasardan vitamin A secara lengkap Mengawasi tumbuh kembang balita di posyandu 10 terdekat dengan Anda Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Selain itu, pemerintah menyelenggarakan PKGBM untuk mencegah stunting, yaitu Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat. PKGBM merupakan strategi komprehensif dan tahan lama untuk menghentikan stunting di beberapa daerah. mengejar tujuan program berikut:
  - a) Mengurangi dan mencegah bayi stunting, malnutrisi, dan berat badan lahir rendah.
  - b) Meningkatkan gaji keluarga/keluarga dengan mengurangi pengeluaran, pengembangan efisiensi dan gaji yang lebih tinggi.

### **2.3.5 Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting**

Indonesia merupakan bagian dari upaya global untuk mempercepat perbaikan gizi bagi semua negara dengan masalah stunting. *World Health Assembly* (WHA) meluncurkan upaya ini pada tahun 2012. Dalam upaya mengurangi stunting, berikut ini adalah sasaran: menurunkan kejadian stunting, wasting, dan obesitas pada balita, menurunkan angka kejadian anemia pada ibu hamil, dan menurunkan angka bayi lahir dengan berat badan kurang. Rendah (BBLR), memperluas cakupan ASI eksklusif.

Rencana jangka panjang, menengah, dan pendek terhadap undang- undang

yang telah ditetapkan oleh Badan Legislasi tidak dapat dipisahkan dari upaya perbaikan gizi. Pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilakukan lintas sektor, meliputi produksi, pengolahan, peredaran, dan konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, dan terjamin, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang menegaskan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk pembangunan pangan dan gizi. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berpotensi untuk mempercepat perbaikan gizi dan meningkatkan pendidikan tentang pentingnya penyediaan pangan yang sehat dan seimbang diet.

Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Peraturan Presiden ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Implementasi Peraturan Presiden ini, selain bertujuan untuk

meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu decade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global Scalling Up Nutrition (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor. Saat ini Indonesia telah memiliki 148 anggota SUN Networks yang terdiri atas 25 kementerian/Lembaga, 11 mitra pembangunan, 40 dunia usaha dan asosiasi, 34 organisasi masyarakat madani, 23 perguruan tinggi serta 15 organisasi profesi, dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai focal point. Percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistic, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. (Bappenas, 2021).

Secara detail, Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 terdiri atas tiga bagian. Pertama, batang tubuh yang terdiri dari 8 bab dan 31 pasal. Kedua, lampiran A yang menguraikan 20 target antara. Ketiga, lampiran B yang terduru atas rincian 71 keluaran (output) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Selain memuat arahan Presiden, Peraturan Presiden ini merupakan wujud kesepakatan antar kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting yang terintegrasi. Dengan terbitnya Peraturan Presiden ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan berjalan beiringan dengan pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi di Indonesia. (Bappenas, 2021).

Pembentukan Tim Percepatan Pengurangan Stunting (TPPS) berdasarkan SK Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan

stunting di Kota Medan merupakan cara Pemerintah dalam menurunkan stunting sesuai pada arahan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menurunkan kejadian stunting pada anak di bawah usia lima tahun, memastikan bahwa anak-anak mengonsumsi jumlah gizi yang dianjurkan, meningkatkan praktik pengasuhan, memperluas akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan memperluas akses ke air bersih dan sanitasi. Kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan terpadu dalam rangka memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat disebut sebagai upaya perbaikan gizi. Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan harus melibatkan kerjasama antara sektor kesehatan dan non-kesehatan untuk mengurangi kasus stunting.

### **2.3.6 Intervensi Stunting**

Perawatan prenatal dan nutrisi ibu harus digunakan untuk memulai program pencegahan stunting sebelum bayi lahir, dan program harus dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun (UNICEF, 2012). Menurut Zahraini (2013), Masa kritis pencegahan stunting dimulai sejak janin dan berlanjut hingga anak berusia dua tahun. Periode waktu ini disebut sebagai 1.000 hari pertama kehidupan. Investasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi generasi sekarang dan mendatang adalah pencegahan gizi buruk ibu dan anak (Victora et al., 2008). Untuk mengurangi jumlah kasus stunting di Indonesia, diperlukan intervensi yang didukung oleh bukti.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi kesehatan. Sementara intervensi gizi

sensitive, yakni intervensu pendukung untuk penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi bahan perbandingan dalam penelitian diantaranya :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Peneliti : Nama Peneliti : Tahun Peneliti :	Masalah Penelitian : Teori :	Persamaan:	Perbedaan :
1.	<b>Judul Penelitian :</b> Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggih Kabupaten Langkat <b>Nama Peneliti :</b> Sri Hajjah Purba <b>Tahun Penelitian :</b> 2019	<b>Masalah:</b> Masih ada program yang belum terlaksana secara optimal seperti pemberian ASI Eksklusif dan pemberian inisiasi menyusui dini <b>Teori :</b> Model Grindle	Sama sama meneliti tentang implementasi kebijakan stunting	<b>Peneliti terdahulu:</b> hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Secanggih sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting , tetapi masih ada program dari kebijakan tersebut yang belum terlaksana secara optimal, seperti pemberian ASI Eksklusif dan pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD). <b>Penelitian ini:</b> hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang sudah berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar

				<p>organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang sudah terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa kendala terkait sumber daya manusia akan kurangnya kesadaran dan pengetahuan ibu akan pentingnya cegah stunting, karakteristik organisasi pelaksana terkait tidak adanya SOP secara langsung dalam melaksanakan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang.</p>
2.	<p><b>Judul Penelitian :</b> Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar <b>Nama Peneliti :</b> Erina Fahzira <b>Tahun Penelitian :</b> 2021</p>	<p><b>Masalah :</b> masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, kurangnya komunikasi dalam mensosialisasikan akan pentingnya stunting. <b>Teori :</b> Edward III.2021</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang kebijakan penurunan stunting.</p>	<p><b>Penelitian Terdahulu :</b> hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumberdaya, diposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dalam hal ini ada beberapa kendala dalam implementasi kabijakan penurunan stunting di kabupaten adalah komunikasi terkait sosialisasi, tidak adanya tim khusus untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting sehingga tanggungjawab pegawai kurang dalam hal ini, masih kurangnya kesadaran masyarakat, kepemilikan tanah</p>

				<p>tidak berdomisili di Kamar.</p> <p><b>Penelitian ini :</b> hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang sudah berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang sudah terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa kendala terkait sumber daya manusia akan kurangnya kesadaran dan pengetahuan ibu akan pentingnya cegah stunting, karakteristik organisasi pelaksana terkait tidak adanya SOP secara langsung dalam melaksanakan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang.</p>
3	<p><b>Judul Penelitian :</b> Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan <b>Nama Peneliti :</b> Santi Sabila <b>Tahun Penelitian:</b> 2021</p>	<p><b>Masalah :</b> Masih ada program yang belum terlaksana akibat beberapa faktor penghambat. <b>Teori :</b> Muasaroh (dalam Dyah Mutiarin &amp; Arif Zainudin, 2014:97)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang stunting</p>	<p><b>Penelitian Terdahulu :</b> Hasil penelitian Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi (studi kasus pada desa Mampari dan desa Banua Hanyar) cukup efektif menurunkan jumlah balita stunting dengan persentasi capaian sebesar 45 % dimana dari total jumlah balita</p>

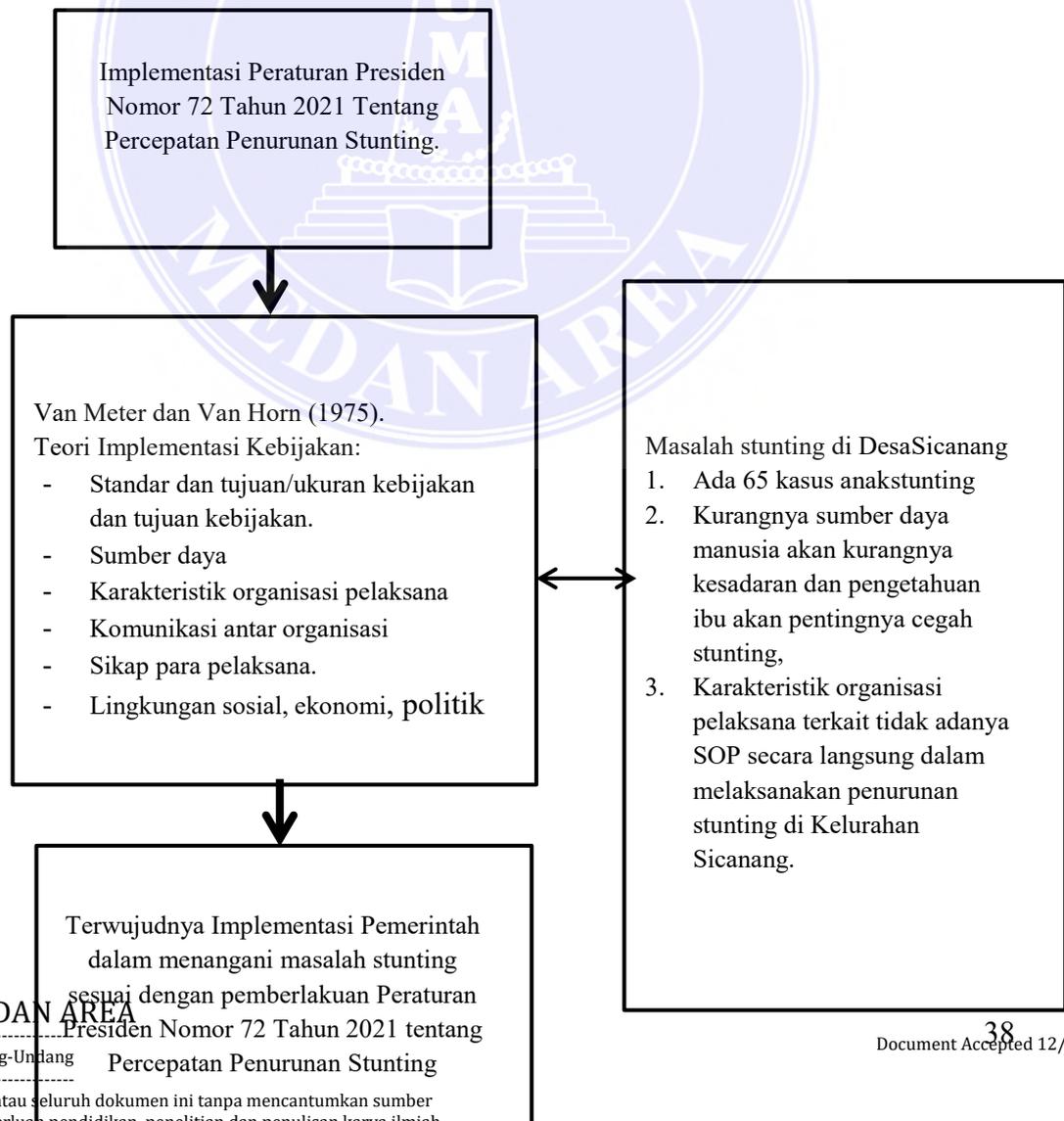
			<p>stunting yaitu sebanyak 31 anak, sebanyak 5 orang anak yang berhasil diperbaiki gizinya menjadi balita normal sedangkan sisanya yaitu 26 orang masih masuk kategori balita stunting.</p> <p><b>Penelitian ini :</b> hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan St unting di Kelurahan Sicanang sudah berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang sudah terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa kendala terkait sumber daya manusia akan kurangnya kesadaran dan pengetahuan ibu akan pentingnya cegah stunting, karakteristik organisasi pelaksana terkait tidak adanya SOP secara langsung dalam melaksanakan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang.</p>
--	--	--	---

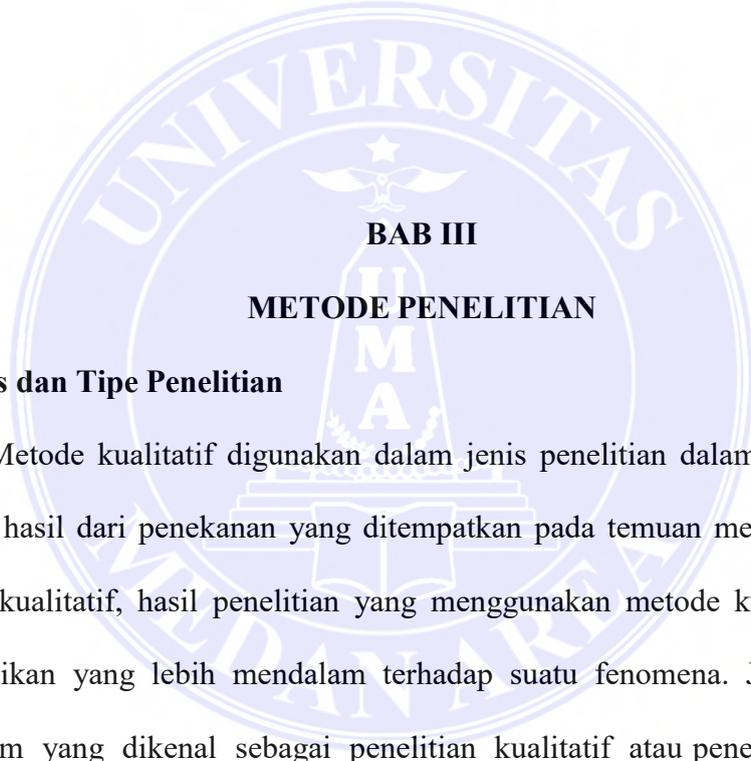
## 2.5 Kerangka Pemikiran

Di Kota Medan, khususnya di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan

Belawan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam percepatan penurunan stunting. Kebijakan yang dikenal dengan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 sedang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya membendung penurunan stunting.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**





**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Metode kualitatif digunakan dalam jenis penelitian dalam penelitian ini. Sebagai hasil dari penekanan yang ditempatkan pada temuan mendalam dengan metode kualitatif, hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif berupa penyelidikan yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena. Jenis penelitian mendalam yang dikenal sebagai penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh melalui perhitungan angka-angka lain atau penerapan prosedur statistik.

Moleong mengutip Bogyan dan Taylor, yang mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan tertulis, data deskriptif atau dari individu yang perilakunya dapat dipelajari. Sementara itu, Kirl dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam

penelitian sosial tertentu yang didasarkan pada pengamatan orang-orang di wilayah mereka sendiri dan berhubungan dengan individu tertentu. Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendalam terhadap individu, kelompok, program, atau bahkan orang lain selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan mendetail tentang suatu entitas sehingga dapat dikumpulkan datanya, yang kemudian dapat dianalisis untuk mengembangkan suatu teori.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

NO	Uraian Kegiatan	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Agustus 2023
1.	Penyusunan Proposal									
2.	Seminar Proposal									
3.	Perbaikan Proposal									
4.	Penelitian									
5.	Penyusunan Skripsi									
6.	Seminar Hasil									
7.	Revisi Skripsi									
8.	Sidang Meja Hijau									

### 3.3 Informan Penelitian

Seseorang yang memiliki informasi tentang objek penelitian adalah informan penelitian. Informan penelitian ini disebut juga sebagai nara sumber, berasal dari wawancara langsung. Teknik yang dilakukan dalam pemilihan informan dalam kegiatan ini adalah perangkat daerah di Kelurahan Sicanang yang

menangani langsung suatu kejadian yang sedang diteliti. Informasi dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang penulis yakini dapat memberikan informasi terkait penelitian. bertanggung jawab atas proses produksi di lapangan.

### 2. Informan Utama

Individu dan kelompok yang dikenal sebagai "informan utama" digunakan sebagai "sumber data" atau "berita utama" untuk memberikan contoh teknis masalah penelitian.

### 3. Informan Tambahan

Individu atau kelompok yang digunakan sebagai isu sekunder atau sumber data dalam mengungkap pendukung asal usul data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian disebut sebagai informan tambahan. Informan pendukung adalah orang-orang yang dapat menambah analisis dan pembahasan penelitian kualitatif dengan memberikan informasi tambahan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Deby Fauziah, S.Sos, M.AP	Lurah Sicanang	Informan Kunci
2.	Franky Josua Gultom, S.Pd	Sekretaris Lurah	Informan Utama
3.	Ratna Erwinda	Ketua Kader	Informan Utama
4.	Muhammad Hatta	Ka.Lingkungan IX	Informan Utama
5.	Veronika	Ibu dari anak penderita stunting	Informan Tambahan
6.	Rini Antika	Ibu dari anak penderita stunting	Informan Tambahan
7.	Ketekti Surbakti	Ibu dari anak yang tidak penderita stunting	Informan Tambahan

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Artinya, untuk menulis dan menghasilkan karya ilmiah, penulis harus memilih metode pengumpulan data yang sesuai. Riduan (2010) mendefinisikan teknik pengumpulan data sebagai "metode"—teknik atau strategi yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

Dalam penelitian kualitatif, ada tiga metode umum untuk mengumpulkan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan dapat ditulis, visual, atau diambil dari dokumen penting atau resmi, tetapi tidak dapat berupa angka, peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi untuk pengumpulan data tambahan guna meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian. Tujuan dari metode triangulasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid. Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini:

### **1. Observasi**

Observasi langsung dilakukan terhadap obyek tempat terjadinya atau peristiwa yang berlangsung dari lapangan, sehingga pengamat berada dengan obyek di sekitarnya. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap apa yang tampak sebagai objek penelitian. Penggunaan format observasi atau blanko sebagai instrumen merupakan cara yang paling efektif untuk melengkapi metode. Format Dusun menunjukkan bahwa peristiwa atau perilaku yang digambarkan akan berlangsung.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan

dilakukan oleh dua pihak. Artinya, pewawancara mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai memberikan tanggapan terstruktur terhadap pertanyaan tersebut. Wawancara digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang orang, peristiwa, kegiatan, kelompok, perasaan, motivasi, tuntutan, dan perhatian. Pihak Kelurahan Sicanang Belawan Medan ditanyai secara mendalam pada saat wawancara, yang dalam pengumpulan informasi berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

### **3. Dokumentasi**

Melalui penggunaan metode pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti tidak hanya dapat memperoleh informasi dari individu yang menjadi nara sumber, tetapi juga dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang dapat diakses oleh informan. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik observasi dan wawancara melengkapi penggunaan teknik dokumentasi. Masalah penelitian memerlukan pengumpulan dokumen dan data yang relevan, yang diikuti dengan pemeriksaan keyakinan dan bukti dari suatu kejadian. Jika hasil observasi atau wawancara didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. (Satori, 2009: 148).

### **4. Triangulasi**

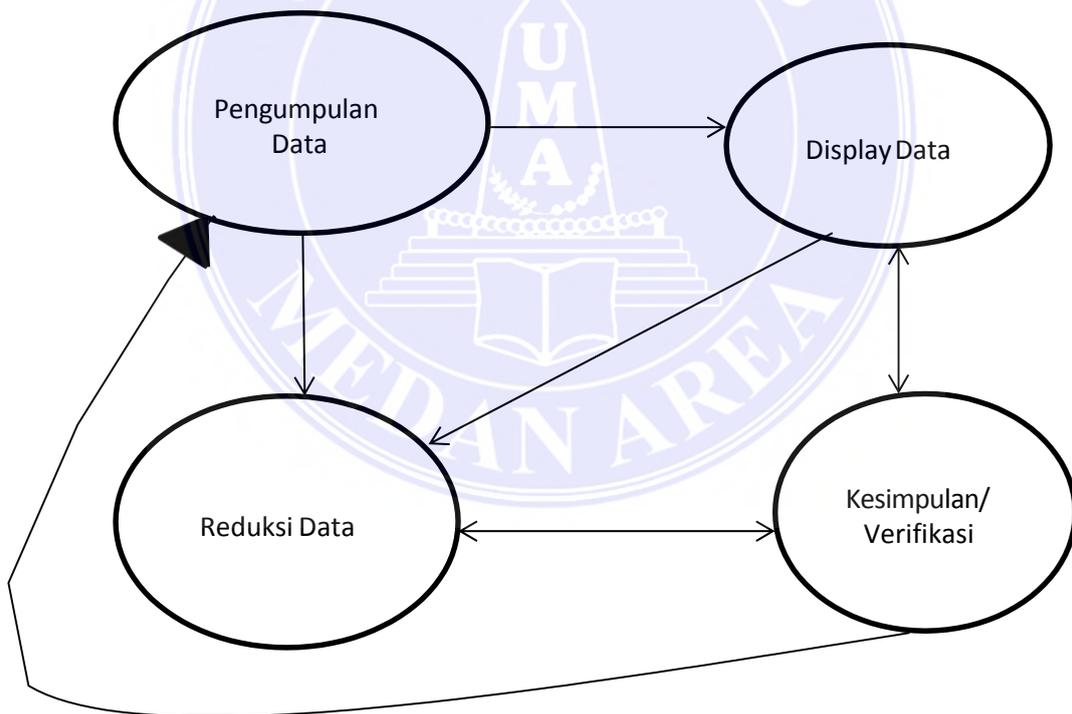
Karena data hanya dapat diperoleh melalui teknik triangulasi, maka penelitian kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi sebagai metode pengumpulannya. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data. Triangulasi adalah proses membandingkan data dari

sumber yang berbeda di waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Triangulasi adalah suatu cara membandingkan atau memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data tersebut. Memeriksa melalui sumber lain, atau membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai alat dan lokasi, adalah metode triangulasi yang paling umum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara lisan dengan informan dan sumber tertulis, seperti buku, surat kabar, dan publikasi lainnya, untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan data. Untuk memverifikasi kebenaran data, wawancara dilakukan dengan tiga sumber/informan dalam penelitian kualitatif. Karena para informan saling mengecek pendapatan, maka disimpulkan bahwa data yang diperoleh benar-benar objektif dari hasil wawancara yang dilakukan secara subjektif.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Metode untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain adalah analisis data berbasis Sugiyono (2018:482). Kategori, unit, sintesis, dan pola adalah tahap akhir dari organisasi data. Penting dan apa yang harus Anda pelajari, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahami analisis data adalah proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam unit dasar deskripsi, kategori, dan pola untuk merumuskan tema dan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut. Meskipun data yang akurat harus dikumpulkan, tidak dapat disangkal bahwa informasi yang berbeda akan diberikan oleh berbagai sumber. Para pekerja harus mengerahkan upaya fisik dan mental selain konsentrasi

ketika menganalisis data. menganalisis data, peneliti harus mengkaji literature untuk mendukung teori tersebut. Triangulasi, proses pengumpulan data dari berbagai sumber, selalu digunakan dalam penelitian kualitatif. penelitian yang menghasilkan variasi data yang sangat tinggi. Metode analisis data penelitian menggunakan model Miles dan Huberman. Buku Sugiyono (2018) Dalam penelitian kualitatif, analisis data diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan frame baik selama dan setelah pengumpulan data. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif sampai selesai untuk menjamin kejenuhan data. Miles dan Huberman menyajikan pola umum analisis menggunakan model interaktif:



Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data

### 1. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono (2018:247-249), "penutup", "memfokuskan pada hal-

hal penting yang relevan dengan topik penelitian”, –mencari tema dan pola”, –memberikan gambaran yang lebih jelas”, dan –memfasilitasi penelitian” adalah semua sinonim untuk proses reduksi data. pengumpulan data tambahan Tujuan yang ditetapkan akan menjadipanduan untuk reduksi data. Selain itu, reduksi data adalah proses berpikir kritis yang memerlukan wawasan mendalam dan tingkat tinggi.

## **2. Penyajian Data (Data Display).**

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data setelah direduksi. Data dapat disajikan dalam tabel, grafik, diagram alur, piktogram, dan format serupa lainnya dalam penelitian kualitatif. Selain itu, deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan format serupa lainnya dapat digunakan untuk menyajikan data kualitatif, tetapi teks naratif biasanya digunakan untuk melakukannya. Data disajikan sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami melalui organisasi dan struktur (Sugiyono, 2018:249).

## **3. Penarikan Kesimpulan.**

Dalam analisis penelitian kualitatif, langkah terakhir disebut kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) Kesimpulan kualitatif dapat memberikan jawaban atas suatu masalah yang telah dirumuskan sejak awal, namun hal ini tidak mungkin dilakukan karena penelitian yang telah disajikan; rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian. Penelitian dilakukan di lapangan. Kesimpulan adalah temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam penelitian kualitatif. Ilustrasi suatu temuan

adalah gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dan memerlukan penjelasan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan sudah dilaksanakan dengan baik ,sesuai dengan indikator oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan sudah melakukan dengan cukup baik kepada masyarakat , dengan adanya program dan bantuan – bantuan dari para donatur.

2. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Sicanang , peneliti memperoleh bahwa masih rendahnya sumber daya manusia yang artinta masih rendahnya kualitas manusianya akan kesadaran pentingnya cegah stunting. Ini semua terjadi karena kurang meratanya pendidikan yang layak faktor ekonomi. Namun untuk sumber daya akan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Sicanang sudah cukup memadai , sehingga mendukung keberhasilan suatu Implementasi Percepatan Penurunan Stunting.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan stunting belum memiliki SOP yang secara langsung yang sesuai dengan bidang kerjanya

masing-masing, namun mereka masih tetap seperti biasanya dengan sesuai pada amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Namun sampai saat ini ketersediaan SOP yang ada di Kelurahan Sicanang hanya masih sampai tingkat kader yang juga pelaksana kebijakan yang ditujukan oleh Lurah.

#### 4. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana

Dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah cukup menerima dengan adanya kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi. Sikap penerimaan atau penolakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan selain sub indikator – indikator lainnya dalam implementasi kebijakan .

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi sudah optimal dilakukan oleh pihak Lurah Sicanang, dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara pelaksana, karena pelaksanaan pencegahan untuk penurunan stunting memerlukan kerja sama yang baik diantara multisektor.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif, dapat dilihat bahwa dari lingkungan

sosial,ekonomi, politik terlaksana dengan baik di Kelurahan Sicanang. Banyak donatur yang membantu, dan bantuan berupa dana maupun pangan. Pihak pelaksana kebijakan penurunan stunting memberikan yang terbaik tanpa ada perbedaan kepada masyarakat yang anaknya terkena stunting.

## 5.2 Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang ada di atas, maka sebagai bahan masukan untuk implementasi program penanggulangan stunting di Kelurahan Belawan Sicanang, antara lain :

1. Untuk Pemerintah Belawan terus meningkatkan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menanggulangi kasus stunting di Kelurahan Sicanang dan terus menjalin kerjasama antar SKPD yang terkait dan juga memberikan pengarahan kepada Puskesmas untuk terus melakukan pemantauan terhadap stunting.
2. Untuk masyarakat dapat proaktif membantu Pemerintah untuk menanggulangi stunting di Kelurahan belawan Sicanang dengan memperhatikan pola asuh anak agar dapat mendapatkan gizi yang lebih baik, masyarakat harus memahami dan mempelajari tentang pemenuhan gizi untuk anak agar tidak terkena dampak gizi buruk yang dapat meningkatkan angka stunting di Kelurahan Sicanang

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja Grafndo Persada.
- Atikah, Rahayu, dkk. (2018). Stunting dan Upaya Pencegahannya. In Buku stunting dan upaya pencegahannya.
- Ahmad, Edy Harahap. (2014). Komunikasi Antarpribadi (Perilaku Insani dalam Organisasi Pendidikan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abuya, B.A., Ciera, J., & Murage, E.K. 2012. Effect of Mother’s Education on Child’s Nutritional Status in The Slums of Nairobi. BMC Pediatrics, 12:80. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444953/>
- Boyle MA and Roth SL, 2010. Personal Nutrition, Seventh Edition. Wadsworth Cengage Learning, USA.
- Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 1999. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C.1980. Implementing Public Policy.Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Glewwe P., Jacoby H., King E., 1999. Gizi Anak Usia Dini dan Prestasi Akademik: Analisis Longitudinal. Divisi Konsumsi Pangan dan Gizi No.68.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2008). Buku Ajar Respirologi anak, edisi pertama. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia
- Kirk Dan Miller. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif (p. 11). Remaja Roskarya.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhilal, dkk. 2004. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan, Widya Karya Pangan & Gizi VIII. LIPI, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja

Rosdakarya.

Pudjiadi. 2001. Ilmu Gizi Klinis pada Anak, FKUI : Jakarta

Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Roesli U. Inisiasi menyusui dini plus ASI eksklusif. Jakarta: Pustaka Bunda; 2008. hal 20-40.

Roesli, Utami. (2000). Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: Niaga Swadaya.

Rudolf, M. & Levene, M. (2006). Paediatrics and Child Health. Blackwell Publishing.

Satori , Djam'an. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Suhelayanti, M. Ridwan Aziz, Dkk.2020. Manajemen Pendidikan. Aceh: Yayasan Kita Menulis.

Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Soetjiningsih, 2004. Buku Ajar: Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Jakarta : Sagung Seto.

Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yongyakarta

Victora CG, Adair L, Fall C, Hallal PC, Martorell L, Richter L, Sachdev HS (2008). Maternal and child undernutrition: Consequences for adult health and human capital. Lancet, 371 (9609): 340-357.

## **Jurnal**

Adair & Guilkey. 1997. Age-specific Determinants of Stunting in Filipino Children. The Journal of Nutrition. 127(2):314-320.

Kusharisupeni. 2002. Growth Faltering Pada Bayi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Universitas Indonesia. <http://journal.ui.ac.id/upload/artikel>.

Meilyasari,Isnawati.2014.Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12 Bulan Di Desa Purwokerto Kecamatan Patebon,Kabupaten Kendal.

Universitas Diponegoro.<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnc>.

## Internet

Bappenas. (2021, Agustus 27). Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaiki Gizi Indonesia. Retrieved from [perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia](https://www.bappenas.go.id/id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia):  
<https://www.bappenas.go.id/id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg>

JPNN.com. (2022, Mei 31). Sicanang Jadi kelurahan dengan Kasus Stunting Terbanyak, Begini Langkah Lurahnya. Retrieved from [kelurahan-sicanang-jadi-daerah-terbanyak-kasus-stunting-anak-begini-langkah-yang-dilakukan-lurah](https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/1384/kelurahan-sicanang-jadi-daerah-terbanyak-kasus-stunting-anak-begini-langkah-yang-dilakukan-lurah):  
<https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/1384/kelurahan-sicanang-jadi-daerah-terbanyak-kasus-stunting-anak-begini-langkah-yang-dilakukan-lurah>

Kemkes RI. Survei Kesehatan Dasar Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012.

Kemendagri RI. Situasi dan analisis ASI eksklusif. pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI. 2014.

Kemendagri RI. 2017, Pemantauan Status Gizi (PSG) 2016. Jakarta: Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

Kemendagri RI. 2018, Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017. Jakarta: Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

Tempo.co. (2011, Juli 14). *Penduduk Indonesia Masuk Peringkat 4 Dunia*. Retrieved from [penduduk-indonesia-masuk-peringkat-4-dunia](https://nasional.tempo.co/read/346495/penduduk-indonesia-masuk-peringkat-4-dunia):  
<https://nasional.tempo.co/read/346495/penduduk-indonesia-masuk-peringkat-4-dunia>

UNICEF. Ringkasan Kajian Gizi. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan - Kementerian Kesehatan RI; 2012.

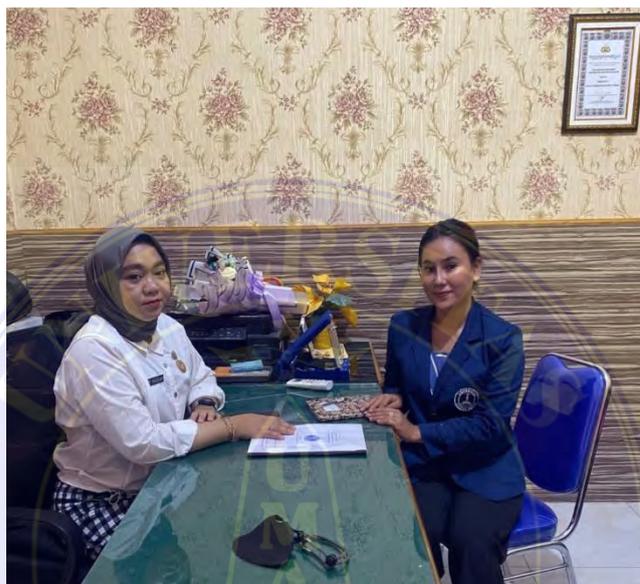
World Health Organisation (WHO). 2014, WHA Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief. Geneva.

WHO. (2011). Health Profile. World Health Organization, 561–565.

Zahraini, Yuni. 2013. 1000 Hari: Mengubah Hidup, Mengubah Masa Depan. <http://www.gizi.depkes.go.id/1000-hari-mengubah-hidup-mengubah-masa-depan>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017

## LAMPIRAN

- **Foto Dokumentasi Wawancara**



*Foto dengan Lurah Sicanang  
(Ibu Deby Fauziah ,S.Sos, M.AP)*



*Foto dengan Sekretaris Sicanang  
(Bapak Franky Josua Gultom,S.Pd)*



*Foto dengan Seluruh Kepling Kelurahan Sicanang*



*Kepala Lingkungan IX Kelurahan Sicanang  
(Bapak Muhammad Hatta )*



*Foto dengan orangtua anak stunting Ibu Veronica*



*Foto dengan orangtua anak stunting Ibu Rini Antika*



*Foto dengan orangtua tidak stunting Ibu Keteki Surbakti*





*Foto dengan Ketua TPP PKK dan Para Kader Stunting*



*Foto dengan seluruh ibu dan anak stunting*



• **Pedoman Wawancara**

No	Informan	Jabatan	Daftar Pertanyaan
1.	Ibu Deby Fauziah ,S.Sos,M.AP	Lurah Sicanang	<p>a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kinerja antara pihak kelurahan dengan masyarakat dalam menyikapi kasus stunting, apakah dengan adanya Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah diterapkan di Kelurahan tersebut?</li> </ul> <p>b. Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada berapa jumlah pegawai yang menangani kasus stunting di Kelurahan Sicanang , dan bagaimana kemampuan para implementor serta sarana prasarana penunjang kegiatan pencegahan dalam penurunan stunting ini ?</li> </ul> <p>c. Karakteristik Agen Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana mengenai SOP (Standard Operational Procedures) untuk stunting ?</li> </ul> <p>d. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana pelaksana program percepatan penurunan stunting ?</li> </ul> <p>e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana komunikasi yang terjadi pada para pelaksana ?</li> </ul> <p>f. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana lingkungan sosial , ekonomi , politik dalam</li> </ul>

			<p>mendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang ini ?</p>
2.	Bapak Josua Gultom, S.Pd	Sekretaris Lurah Sicanang	<p>a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan - Bagaimana kinerja antara pihak kelurahan dengan masyarakat dalam menyikapi kasus stunting, apakah dengan adanya Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah diterapkan di Kelurahan tersebut?</p> <p>b. Sumber Daya - Ada berapa jumlah pegawai yang menangani kasus stunting di Kelurahan Sicanang , dan bagaimana kemampuan para implementor serta sarana prasarana penunjang kegiatan pencegahan dalam penurunan stunting ini ?</p> <p>c. Karakteristik Agen Pelaksana - Bagaimana mengenai SOP (Standard Operational Procedures) untuk stunting ?</p> <p>d. Sikap Atau Kecendrungan Para Pelaksana - Bagaimana pelaksana program percepatan penurunan stunting ?</p> <p>e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana - Bagaimana komunikasi yang terjadi pada para pelaksana ?</p> <p>f. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi - Bagaimana lingkungan sosial</p>

			, ekonomi , politik dalam mendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang ini ?
3.	Ibu Ratna Erwinda	Ketua Kader	<p>a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kinerja antara pihak kelurahan dengan masyarakat dalam menyikapi kasus stunting, apakah dengan adanya Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah diterapkan di Kelurahan Sicanang?</li> </ul> <p>b. Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada berapa banyak jumlah pegawai yang menangani kasus stunting di Kelurahan Sicanang ini, dan bagaimana kemampuan para implementor serta sarana prasarana penunjang kegiatan pencegahan dalam penurunan stunting ini ?</li> </ul> <p>c. Karakteristik Agen Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana mengenai SOP(Standard Operational Procedures) untuk stunting di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul> <p>d. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana pelaksana program percepatan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul> <p>e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana komunikasi yang</li> </ul>

			<p>terjadi antar para pelaksana kepada organisasi lainnya ?</p> <p>f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik</p> <p>- Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam mendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang ini?</p>
4.	Muhammad Hatta	Ka. Lingkungan IX	<p>a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan</p> <p>- Bagaimana kinerja antara pihak kelurahan dengan masyarakat dalam menyikapi kasus stunting, apakah dengan adanya Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah diterapkan di Kelurahan Sicanang?</p> <p>b. Sumber Daya</p> <p>- Ada berapa banyak jumlah pegawai yang menangani kasus stunting di Kelurahan Sicanang ini, dan bagaimana kemampuan para implementor serta sarana prasarana penunjang kegiatan pencegahan dalam penurunan stunting ini ?</p> <p>c. Karakteristik Agen Pelaksana</p> <p>- Bagaimana mengenai SOP (Standard Operational Procedures) untuk stunting di Kelurahan Sicanang ini ?</p> <p>d. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana</p> <p>- Bagaimana pelaksana program percepatan penurunan</p>

			<p>stunting di Kelurahan Sicanang ini ?</p> <p>e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana komunikasi yang terjadi antar para pelaksana kepada organisasi lainnya ?</li> </ul> <p>f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam mendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Sicanang ini?</li> </ul>
5.	Veronika	Ibu dari anak penderita stunting	<p>a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kinerja pihak lurah kepada masyarakat dalam menyikapi kasus stunting, apakah pihak kelurahan sudah menerapkan Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan ini ?</li> </ul> <p>b. Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana terkait sumber daya yang ada di Kelurahan Sicanang ini, dan apakah dengan sumber daya yang ada dapat meringankan kasus terkait stunting ini?</li> </ul> <p>c. Karakteristik Agen Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana prosedur para pelaksana dalam menangani stunting ini, apakah sudah sesuai SOP (Standard Operational Procedures) yang semestinya berjalan ?</li> </ul>

			<p>d. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana masyarakat sebagai sasaran Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul> <p>e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana komunikasi para pelaksana kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul> <p>f. Lingkungan Sosial,Ekonomi,Dan Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana lingkungan eksternal dalam membantu pencegahan untuk penurunan stunting anak di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul>
6.	Rini Antika	Ibu dari anak penderita stunting	<p>a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kinerja pihak lurah kepada masyarakat dalam menyikapi kasus stunting, apakah pihak kelurahan sudah menerapkan Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan ini ?</li> </ul> <p>b. Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana terkait sumber daya yang ada di Kelurahan Sicanang ini, dan apakah dengan sumber daya yang ada dapat meringankan kasus terkait stunting ini?</li> </ul>

			<p>c. Karakteristik Agen Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana prosedur para pelaksana dalam menangani stunting ini, apakah sudah sesuai SOP(Standard Operational Procedures) yang semestinya berjalan ?</li> </ul> <p>d. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana masyarakat sebagai sasaran Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul> <p>e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana komunikasi para pelaksana kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul> <p>f. Lingkungan Sosial,Ekonomi,Dan Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana lingkungan eksternal dalam membantu pencegahan untuk penurunan stunting anak di Kelurahan Sicanang ini ?</li> </ul>
7.	Ketekti Surbakti	Ibu dari anak yang tidak penderita stunting	<p>a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kinerja pihak lurah kepada masyarakat dalam menyikapi kasus stunting, apakah pihak kelurahan sudah menerapkan Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan ini ?</li> </ul>

			<p>b. Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana terkait sumber daya yang ada di Kelurahan Sicanang ini, dan apakah dengan sumber daya yang ada dapat meringankan kasus terkait stunting ini?</li></ul> <p>c. Karakteristik Agen Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana prosedur para pelaksana dalam menangani stunting ini, apakah sudah sesuai SOP(Standard Operational Procedures) yang semestinya berjalan ?</li></ul> <p>d. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana masyarakat sebagai sasaran Kebijakan Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pecepatan Penurunan Stunting Di Kelurahan Sicanang ini ?</li></ul> <p>e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana komunikasi para pelaksana kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sicanang ini ?</li></ul> <p>f. Lingkungan Sosial,Ekonomi,Dan Politik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana lingkungan eksternal dalam membantu pencegahan untuk penurunan stunting anak di Kelurahan Sicanang ini ?</li></ul>
--	--	--	---



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 04 /FIS.2/01.10/1/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

6 Januari 2023

Yth,  
Bapak/Ibu Lurah Kelurahan Belawan Sicanang  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Lamria Sari Situmorang  
N P M : 198520057  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Kelurahan Belawan Sicanang, dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN (PEPRES) NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Studi Kasus Di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-





**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN BELAWAN  
KELURAHAN BELAWAN SICANANG**  
JL. KELAPA NO. 1 BELAWAN SICANANG - 20416

Medan, 17 Januari 2023

Nomor : 423.4 / 11

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

di

Medan

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor :  
04/FIS.2/01.10/1/2023 Tanggal 06 Januari 2023 perihal Pengambilan Data/ Riset, atas nama  
mahasiswa :

Nama : LAMRIA SARI SITUMORANG

N P M : 198520057

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan  
Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh data guna penyusunan  
skripsi dengan Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun  
2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Di Kelurahan Sicanang Kecamatan  
Medan Belawan).

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

LURAH BELAWAN SICANANG  
KECAMATAN MEDAN BELAWAN



DEBY FAUZIAH, S.Sos, M. AP  
NIP. 196512122005022001